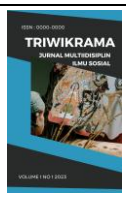
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




# PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DI KABUPATEN CIAMIS

**Ela Nurlaela[1)*], Agus Nurulsyam suparman[2)], Asep Nurwanda[3)]**
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online Juni 2026

**Email:**
ela_nurlaela03@student.unigal.ac.id

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2026 by Author.*

**Abstrak**

Permasalahan anak jalanan dan gelandangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, keterampilan, serta keberfungsian sosial masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan, serta pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, instansi terkait, lembaga sosial, serta anak jalanan dan gelandangan. Analisis penelitian menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2015:211) yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu norma peran, konsep peran, dan perilaku peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan melalui kegiatan penjangkauan, pendataan, asesmen, pembinaan, rehabilitasi sosial, koordinasi lintas sektor, serta reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti belum adanya regulasi daerah khusus mengenai penanganan anak jalanan dan gelandangan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pelayanan sosial, kurangnya partisipasi penerima manfaat, serta kondisi keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi antarinstansi, melakukan pendekatan secara persuasif, memanfaatkan fasilitas yang tersedia, serta memperkuat program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Sosial, Anak Jalanan, Gelandangan, Kabupaten Ciamis.

## PENDAHULUAN

Permasalahan sosial merupakan salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh berbagai daerah dalam proses pembangunan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah yaitu keberadaan anak jalanan dan gelandangan sebagai kelompok masyarakat yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keberadaan kelompok tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan perhatian, pelayanan, dan pemberdayaan dari pemerintah. Anak jalanan dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, permasalahan keluarga, lingkungan sosial, serta terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih atau terpaksa menjalani kehidupan di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Mulyati et al. (2022), permasalahan sosial muncul akibat adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan

kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan anak jalanan dan gelandangan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu, tetapi menjadi permasalahan sosial yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, perlindungan, serta pelayanan sosial. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang sosial.

Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas dalam menyelenggarakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Penanganan anak jalanan dan gelandangan tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi keberadaan mereka di ruang publik, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang dapat membantu mereka meningkatkan keberfungsian sosialnya. Menurut Diyanayati dan Weningtyastuti (2017), penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Penanganan anak jalanan dan gelandangan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Anak jalanan dan gelandangan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan proses pendataan, asesmen, pembinaan, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan penanganan membutuhkan peran pemerintah yang jelas melalui kebijakan, program, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam pelayanan sosial.

Dalam pelaksanaannya, penanganan anak jalanan dan gelandangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Permasalahan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga sosial, keluarga, serta masyarakat. Dinas Sosial memiliki posisi penting sebagai pihak yang menjalankan fungsi pelayanan sosial melalui berbagai kegiatan seperti penjangkauan, pendataan, asesmen kondisi penerima layanan, pembinaan sosial, pemberian bantuan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana Dinas Sosial menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan anak jalanan dan gelandangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, tingkat kemiskinan Kabupaten Ciamis dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan, namun permasalahan sosial akibat kemiskinan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, keberadaan anak jalanan dan gelandangan masih menjadi bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, keberadaan kelompok tersebut tetap menunjukkan adanya permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah melalui pelayanan dan program penanganan yang tepat.

Dalam menangani permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai upaya melalui pendataan, penjangkauan, asesmen, pembinaan sosial, pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti Satpol PP,

lembaga sosial, dan instansi terkait lainnya. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan peran Dinas Sosial belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut antara lain belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai penanganan anak jalanan dan gelandangan, keterbatasan fasilitas pelayanan sosial seperti belum tersedianya rumah singgah atau fasilitas rehabilitasi khusus, keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pendampingan, serta kondisi penerima layanan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial juga masih menghadapi tantangan karena tidak semua penerima layanan bersedia mengikuti proses pembinaan secara berkelanjutan.

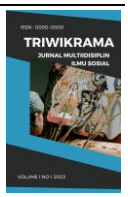
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan dan gelandangan membutuhkan penguatan peran pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan sosial, pengembangan program pembinaan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan fasilitas pendukung yang lebih memadai. Penanganan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga harus mampu menciptakan perubahan agar penerima layanan dapat meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosialnya.

Penelitian mengenai permasalahan kesejahteraan sosial telah banyak dilakukan, namun kajian mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan pada tingkat daerah masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto yang melihat peran melalui tiga aspek yaitu norma peran, konsep peran, dan perilaku peran. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani anak jalanan dan gelandangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis" penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran Dinas Sosial serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial agar penanganan anak jalanan dan gelandangan dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Peran merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh individu maupun lembaga dalam menjalankan tugasnya di lingkungan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2015:211), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan posisi yang dimiliki, tetapi juga bagaimana suatu individu atau lembaga mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya melalui tindakan nyata. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran pemerintah daerah memiliki kedudukan penting dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pemberdayaan kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Menurut Siagian (2020:142), peran merupakan bentuk pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi pemerintah dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Menurut Soerjono Soekanto (2015:211), peran dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Norma Peran
   Norma peran merupakan seperangkat aturan, nilai, dan pedoman yang berkaitan dengan kedudukan seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Norma tersebut menjadi dasar dalam menentukan bagaimana suatu lembaga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, norma peran berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang menjadi dasar Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan penanganan anak jalanan dan gelandangan.
2. Konsep Peran
   Konsep peran merupakan gambaran mengenai tindakan atau fungsi yang seharusnya dilakukan oleh individu maupun lembaga sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Konsep peran menunjukkan bagaimana suatu lembaga menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep peran dilihat dari bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menjalankan fungsi pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta perlindungan terhadap anak jalanan dan gelandangan.
3. Perilaku Peran
   Perilaku peran merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Perilaku peran dapat dilihat melalui tindakan, program, serta kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, perilaku peran Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dapat dilihat melalui pelaksanaan pendataan, penjangkauan, pembinaan, pemberian bantuan sosial, serta kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan dan gelandangan.

Permasalahan sosial merupakan kondisi yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan kenyataan sosial yang terjadi. Menurut Soekanto (2015), masalah sosial merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan sosial. Permasalahan sosial membutuhkan perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan sosial. Salah satu bentuk masalah sosial yang masih terjadi adalah keberadaan anak jalanan dan gelandangan. Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan untuk melakukan aktivitas tertentu, baik bekerja maupun memenuhi kebutuhan hidup akibat faktor ekonomi, keluarga, maupun lingkungan sosial. Sedangkan gelandangan merupakan individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap serta pekerjaan yang stabil sehingga memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas informal. Kondisi tersebut menyebabkan anak jalanan dan gelandangan menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan sosial.

Keberadaan anak jalanan dan gelandangan tidak hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, permasalahan keluarga, serta lingkungan sosial. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan dan gelandangan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga melalui proses pembinaan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta pendampingan secara berkelanjutan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, Dinas Sosial sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial memiliki tugas dalam memberikan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Penanganan anak jalanan dan gelandangan dilakukan melalui berbagai upaya seperti pendataan,

penjangkauan, pembinaan, pemberian bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto sebagai dasar analisis untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan. Analisis dilakukan melalui tiga aspek peran yaitu norma peran, konsep peran, dan perilaku peran sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan peran Dinas Sosial telah berjalan dalam menangani permasalahan sosial tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan makna dari suatu permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023:9), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Sedangkan menurut Nazir (2014), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2015:211) sebagai dasar analisis penelitian. Teori tersebut menjelaskan bahwa peran dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu norma peran, konsep peran, dan perilaku peran. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani anak jalanan dan gelandangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan anak jalanan dan gelandangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, peraturan, laporan kegiatan, data Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, serta sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, instansi terkait, lembaga sosial, serta perwakilan anak jalanan dan gelandangan yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan dan gelandangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen, arsip, dan data pendukung lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta memfokuskan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam penanganan anak jalanan dan gelandangan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis. Permasalahan anak jalanan dan gelandangan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang masih membutuhkan perhatian pemerintah karena berkaitan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi ekonomi, pendidikan, keluarga, serta lingkungan sosial masyarakat. Keberadaan anak jalanan dan gelandangan menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan peran tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penjangkauan, pendataan, asesmen, pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta reintegrasi sosial. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan agar anak jalanan dan gelandangan dapat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka serta mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada sembilan informan yang terdiri dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, instansi terkait, lembaga sosial, anak jalanan, dan gelandangan, diperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dan gelandangan. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2015:211) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Berdasarkan teori tersebut, peran dapat dilihat melalui tiga dimensi yaitu:

1. Norma Peran
2. Konsep Peran
3. Perilaku Peran

Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis telah berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### 1. Norma Peran

Norma peran merupakan aspek yang berkaitan dengan aturan, nilai, pedoman, serta ketentuan yang menjadi dasar bagi suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam pelaksanaan pemerintahan, norma peran menjadi dasar agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, dimensi norma peran digunakan untuk melihat bagaimana kesesuaian pelaksanaan program Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam menangani anak jalanan dan gelandangan berdasarkan regulasi serta kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan penanganan anak jalanan dan gelandangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis telah mengacu pada regulasi mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari proses identifikasi, pendataan, asesmen kondisi sosial, pemberian pelayanan, pembinaan, hingga proses reintegrasi sosial.

Dalam pelaksanaan penanganan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Satpol PP, LKSA, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk mendukung proses penjangkauan dan pelayanan agar penanganan terhadap anak jalanan dan gelandangan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial diketahui bahwa pelaksanaan penanganan dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam bidang pelayanan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya Kabupaten Ciamis masih belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai penanganan anak jalanan dan gelandangan sehingga pelaksanaan program masih mengacu pada regulasi umum mengenai kesejahteraan sosial. Selain itu, terdapat hambatan lain berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya pendukung, serta kondisi penerima layanan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan pelaksanaan pelayanan membutuhkan penyesuaian di lapangan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi, menjalin kerja sama dengan lembaga sosial, serta melakukan penyesuaian pelaksanaan program berdasarkan kondisi anak jalanan dan gelandangan yang ditangani.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi norma peran dalam Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program telah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, tetapi masih terdapat hambatan terutama dalam aspek regulasi daerah yang belum secara khusus mengatur penanganan anak jalanan dan gelandangan.

**2. Konsep Peran**

Konsep peran merupakan gambaran mengenai tindakan, fungsi, serta tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Konsep peran menunjukkan bagaimana suatu organisasi menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep peran digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menjalankan fungsi pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, koordinasi dengan pihak terkait, serta penyediaan fasilitas pelayanan bagi anak jalanan dan gelandangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ciamis telah melaksanakan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui kegiatan asesmen, pembinaan sosial, pendampingan, serta pemberian akses pelatihan keterampilan. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing penerima layanan sehingga bentuk penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Pelaksanaan pelayanan sosial juga dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga sosial seperti LKSA dalam memberikan pendampingan kepada anak jalanan. Melalui kerja sama tersebut, anak mendapatkan pembinaan berupa pendampingan kegiatan sehari-hari, pendidikan, serta pembentukan kemandirian.

Selain pelayanan sosial, Dinas Sosial juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam proses penanganan. Koordinasi dilakukan mulai dari proses penjangkauan, pendataan, pembinaan, hingga proses reintegrasi sosial.

Namun berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan konsep peran. Hambatan tersebut yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan sosial, belum tersedianya rumah singgah atau tempat rehabilitasi khusus bagi anak jalanan dan gelandangan di Kabupaten Ciamis, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pendampingan secara maksimal. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, meningkatkan kerja sama dengan lembaga sosial, melakukan rujukan kepada layanan yang lebih sesuai, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi konsep peran dalam Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya pelaksanaan

pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam fasilitas dan sumber daya pendukung.

**3. Perilaku Peran**

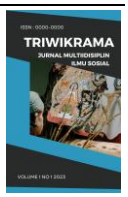
Perilaku peran merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab suatu lembaga melalui tindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Perilaku peran menunjukkan bagaimana suatu lembaga menjalankan perannya melalui kegiatan nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, perilaku peran dilihat melalui pelaksanaan penjangkauan, pendataan, penanganan awal, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial terhadap anak jalanan dan gelandangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penjangkauan dilakukan oleh Dinas Sosial bersama Satpol PP melalui kegiatan lapangan maupun berdasarkan laporan masyarakat. Setelah dilakukan penjangkauan, anak jalanan dan gelandangan dilakukan pendataan serta asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka. Dalam proses penanganan awal, pendekatan dilakukan secara persuasif agar penerima layanan bersedia mengikuti proses pembinaan. Hal tersebut dilakukan karena sebagian anak jalanan dan gelandangan masih memiliki rasa takut atau kurang percaya terhadap petugas.

Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pembinaan sosial, serta pemberian akses pelatihan keterampilan. Namun, tidak semua penerima layanan bersedia mengikuti proses pembinaan karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kebiasaan hidup di jalan, serta kurangnya motivasi untuk berubah. Selain itu, pelaksanaan reintegrasi sosial dilakukan melalui pemulangan kepada keluarga maupun rujukan ke layanan sosial lain. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan keluarga, pemerintah desa, maupun Dinas Sosial daerah asal apabila penerima layanan berasal dari luar wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam pelaksanaan perilaku peran masih terdapat hambatan yaitu anak jalanan dan gelandangan yang berpindah-pindah tempat, kurang kooperatif dalam proses pendataan, keterbatasan informasi mengenai keluarga, kondisi keluarga yang kurang mendukung, serta masih adanya penerima layanan yang kembali melakukan aktivitas di jalan. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan pendekatan secara persuasif, melakukan penjangkauan secara rutin, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memberikan pendampingan secara bertahap agar penerima layanan mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi perilaku peran dalam Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan penanganan telah dilakukan, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan dari kondisi penerima layanan maupun keterbatasan pelaksanaan program.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan melalui tiga dimensi peran yaitu norma peran, konsep peran, dan perilaku peran. Dinas Sosial telah menjalankan tugasnya melalui pelaksanaan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, koordinasi lintas sektor, penjangkauan, pembinaan, serta reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa belum adanya regulasi daerah khusus, keterbatasan fasilitas pelayanan sosial, keterbatasan sumber daya pendukung, serta kondisi penerima layanan yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan fasilitas pelayanan sosial, serta pengembangan program pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan agar penanganan anak jalanan dan gelandangan di Kabupaten Ciamis dapat berjalan lebih efektif.




## KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan di Kabupaten Ciamis merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan penanganan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendataan, penjangkauan, asesmen, pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, koordinasi lintas sektor, hingga proses reintegrasi sosial kepada keluarga maupun lingkungan asal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Kabupaten Ciamis berdasarkan dimensi norma peran, konsep peran, dan perilaku peran telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Pada aspek norma peran, pelaksanaan program telah mengacu pada regulasi kesejahteraan sosial, tetapi masih terkendala karena belum adanya regulasi daerah khusus yang mengatur penanganan anak jalanan dan gelandangan. Pada aspek konsep peran, pelayanan sosial dan rehabilitasi telah dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, serta kerja sama dengan berbagai pihak, namun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung. Sedangkan pada aspek perilaku peran, kegiatan penjangkauan, pembinaan, dan reintegrasi sosial telah dilakukan, tetapi masih menghadapi hambatan seperti kondisi penerima layanan yang beragam, kurangnya partisipasi, serta adanya penerima layanan yang kembali beraktivitas di jalan.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis telah menunjukkan komitmen dalam menangani permasalahan anak jalanan dan gelandangan melalui pelayanan sosial dan kerja sama lintas sektor. Namun, diperlukan peningkatan regulasi, penguatan fasilitas pelayanan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pembinaan yang berkelanjutan agar penanganan anak jalanan dan gelandangan di Kabupaten Ciamis dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial. JDIH BPK (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/227668/perbup-kab-ciamis-no-72-tahun-2021

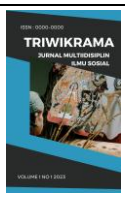
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. JDIH BPK (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Details/270737/perda-kab-ciamis-no-10-tahun-2012

Diyanayati, K., & Weningtyastuti, R. (2017). Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 16*(2).

Mulyati, Y., Caesar, M., Ridwan, & Purnama, E. (2022). Permasalahan Sosial dalam Perspektif Masyarakat. *Journal of Policy Issues, 1*(1).

Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 10*(1), 1–11.

Rachman, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS), 2*, 662–672.




Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhardono, E. (2018). *Teori Perilaku Peran dalam Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Siagian, S. P. (2020). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suharto, E. (2015). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Sarwono, S. W. (2017). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.